



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas BerkatNya dan RahmatNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat disusun dengan baik dan juga merupakan akhir periode perencanaan lima tahunan.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2022 adalah sebagai bentuk penjabaran dan integrasi dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah ditetapkan dan Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan serta memberi gambaran tentang penjabaran lebih rinci mengenai Program dan Kegiatan serta target capaian kinerja masing-masing yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) 2022 yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 dan juga akan menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan ini disusun, semoga dapat menjadi tolak ukur dan menjadi pedoman bagi semua pihak dan untuk mewujudkan Penegakan Perda, penegakan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 20 Juli 2021

KEPALA SATUAN,
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
Drs. ABDUL KADIR
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19621231 198512 1 028



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I		
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II		
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA		
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	18
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III		
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	24
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV		
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V		
PENUTUP	33



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 20202.
3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021.

Keberhasilan penegak Perda dan Perbup, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan sangat berdampak langsung dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan *Good Governance*. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh APBD, namun hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem penegakan Perda, Perbup dan Ketertiban umum daerah saat ini mampu memberikan nuansa rasa Aman, Tertib dan Sejahtera.

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana daerah memiliki urusan yang menjadi kewenangan, meliputi ***urusan wajib***, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai pasal 12 Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 12 huruf e, Satpol PP melaksanakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunuka tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang EKPPD ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Penyempurnaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Permenpan dan RB. Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daderah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016- 2021.
20. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.
21. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2022
22. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2016- 2021 Nomor 188.4/16.01/SATPOL.PP/I/2019

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan menyusun dan merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dan juga melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021.



1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2022 adalah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2022 meliputi:

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab. V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja selain merupakan wujud pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Nunukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran, tujuan, organisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis lewat pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak kriminal (Target 100 % Realisasi 73 %)
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Target 2 Orang Realisasi 0 dengan Capaian 0)
 - Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan (Target 80% Realisasi 1.2% Capaian 1.5%)



- b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Target 9 Dokumen Realisasi 9 Dokumen)
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Target 12 Bulan Realisasi 12 Bulan)
- c. Realisasi terhadap Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Target 100% Realisasi 102%)
 - Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di daerah (Target 85% Realisasi 100% dengan Capaian 118%)
- d. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
- Tidak Teranggarkannya kegiatan pendukung target program
 - Adanya Rasionalisasi Anggaran
 - Penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan
 - Kurang Optimalnya Pelaksanaan kegiatan yang memiliki target pencapaian terhadap program
- e. implikasi terhadap capaian program renstra perangkat daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- Melihat skala prioritas dari Program/Kegiatan dalam Melakukan rasionalisasi, agar tidak berdampak pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
 - Mengusulkan kembali Program/Kegiatan dan pagu untuk pencapaian target yang belum terpenuhi.



- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian secara langsung terhadap target Program.

dari uraian tersebut diatas dapat disajikan kedalam tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah sebagai berikut :



REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN)

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2019 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Tahun berjalan)		
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	05	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERLAKSANYA ADMINSTRASI PERKANTORAN	100	100	100	101	101	100	101	
1	05	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	12	12	100	12	100
1	05	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12	12	100	12	100
1	05	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	12	100	12	100
1	05	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa pemeliharaan Peralatan Kerja	12	12	100	12	100
1	05	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	12	100	12	100
1	05	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12	100	12	100
1	05	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12	12	100	12	100
1	05	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	12	100
1	05	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu / rapat	11	11	100	11	100



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2019 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020(Tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 05 03 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Dokumen Koordinasi dan Konsultasi	90	90	90	99	111	90	189	211
1 05 03 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Koordinasi, Konsultasi, Integritas dan Sinergitas berjalan lancar	90	90	90	96	107	90	186	207
1 05 03 01 20	Penyediaan Jasa Umum Perkantoran	Tersedianya jasa umum perkantoran	12	12	12	12	100	12	24	200
1 05 03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG MEMADAAI	100	100	100	100	100	100	200	200
1 05 03 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	12	12	12	100	12	24	200
1 05 03 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	TERCIPANYA KUALITAS SDM APARATUR	265	0	265	301	114	0	301	114
1 05 03 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	265	0	265	301	114	0	301	114
1 05 03 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KAPASITAS SERTA PENGETAHUAN PERSONIL SATPOL PP DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI	2	0	2	2	100	2	4	200
1 05 03 05 05	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah	Tersedianya SDM yang berkualitas dan berspesifikasi dalam melaksanakan tupoksi	2	23	2	2	100	2	4	200
1 05 03 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	MENINGKATNYA SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9	9	9	9	100	9	9	100
1 05 03 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaporan dan Keuangan	9	9	9	9	100	9	9	100



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2019 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 05 03 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	TERSELESAIKANNYA PERMASALAHAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN (K3)	100	94	100	94	94	100	94	94
1 05 03 16 07	Peningkatan kerjasama dengan aparat Penegak hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3	Operasi penertiban pedagang kaki lima, penertiban PMKS, penertiban Pelajar/PNS/NON PNS, dan masalah K3 lainnya	100	94	100	73	73	100	73	73
1 05 03 16 08	Kegiatan patroli wilayah	Operasi pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	3	2	3	2	67	3	2	67
1 05 03 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI PELAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN	12	12	12	12	100	12	12	100
1 05 03 17 58	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	12	12	12	12	100	12	12	100
1 05 03 28	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI DAERAH	MENINGKATNYA KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH	83	42	83	140	169	85	140	169
1 05 03 28 01	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pengendalian dan Penegakan Perda dan Perkada	Operasi pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	20	23	20	20	100	50	20	100
1 05 03 28 02	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	6	5	6	6	100	2	11	183



1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menetapkan dua indikator. Adapun indikator tersebut dapat disajikan kedalam tabel seperti dibawah ini :



TABEL II. 1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NUNUKAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Tingkat ketaatan masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah.			83	85	90	90	169	100	0	90	Relasiasi 2019 dan Proyeksi 2020 - 2021 menggunakan persentase target realisasi program
2	Presentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Keindahan.			100	100	100	100	94	73	0	100	Relasiasi 2019 dan Proyeksi 2020 - 2021 menggunakan persentase target realisasi program



Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI
1	Persentase pelanggaran PERDA yang ditangani	Pelanggaran Perda yang terselesaikan/ Jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan masyarakat atau teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %	Data bersumber dari Bidang Penegakan Peraturan PerUU Daerah yakni data Identifikasi pelanggaran Perda oleh Satpol PP atau Laporan pelanggaran Perda dari masyarakat	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke bidang Penegakan PerUU Daerah, melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja sasaran per triwulan
2	Presentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Keindahan.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan/ Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat atau teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %	Data bersumber dari Bidang TibumTranmas yakni data Identifikasi pelanggaran K3 oleh Satpol PP atau Laporan pelanggaran K3 dari masyarakat	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke bidang TibumTranmas, melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja sasaran per triwulan



1.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan adapun isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut :

- Peningkatan Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada.
- Optimalisasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.
- Peningkatan Koordinasi antar instansi terkait Perda/Perkada.
- Peningkatan Koordinasi dan konsultasi lintas bidang dan bagian pada internal Satpol PP.
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.
- Dukungan sarana dan prasana.

Permasalahan dan hambatan yang dialami selama pada 2021 dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

1.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Dalam upaya melanjutkan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2016 – 2021, banyak menemui Berbagai Permasalahan dan Hambatan baik dari dalam (Intern) maupun dari luar (Eksteren). Untuk itu dituntut peran serta dan kerjasama yang sinergi dari seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, lintas instansi, Aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya



Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Sinergitas antar lembaga/instansi, Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum lainnya masih sangat kurang.
- b. Koordinasi dan konsultasi lintas bidang dan bagian secara internal.
- c. Jumlah personil masih belum memadai dibanding dengan tugas, fungsi dan letak geografis wilayah yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan Negara lain.
- d. Kurangnya aparatur yang menguasai permasalahan dengan spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni.
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang masih kurang lengkap.
- f. Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Perda maupun Perkada.

Dengan permasalahan dan hambatan tersebut diatas akan sangat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang telah dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terhadap capaian program nasional terutama pada Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1.3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah menghadapi berbagai macam tantangan, diantaranya :



1. Rendahnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati antara lain ditandai dengan :
 - a. Maraknya pembangunan rumah/toko/gedung baru yang tidak memiliki dan/atau tidak sesuai dengan IMB serta melewati GSB.
 - b. Hampir sebagian besar rumah/bangunan masyarakat dan Pemerintah yang telah ada di Nunukan belum memiliki IMB dan melewati GSB.
 - c. Maraknya *café*, resto, Rumah Makan, warung yang tidak sesuai dengan Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan hiburan umum, pengelolaan kebersihan dan Perijinan.
2. Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktifitas diatas trotoar, badan jalan, pertokoan dan fasilitas umum lainnya.
3. Kurangnya ketaatan masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan.

Dengan adanya tantangan tersebut, maka peluang Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Melakukan Sosialisasi, Penertiban, Pengawasan dan Evaluasi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang aman, tertib, tenteram dan berbudaya;
2. Melakukan pendeteksian dini untuk memperoleh informasi dan data terhadap potensi pelanggaran Perda;
3. Berpartisipasi aktif kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan mengajak kearah yang lebih positif;
4. Terjalannya koordinasi antara PD teknis sebagai pemangku Perda dan *Stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda;



5. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2022, Prioritas Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2022. Secara spesifik review rancangan awal RKPD dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat disampaikan kedalam table Tabel II. 2 dibawah ini.



Tabel II. 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Nunukan

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 1 Dari 4

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Nunukan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10 Dokumen	73,650,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Nunukan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10 Dokumen	73,650,000	
I.I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	10 Dokumen	58,150,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	10 Dokumen	58,150,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	15,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	15,500,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	8 Dokumen	42,650,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	9 Dokumen	42,650,000	
I.II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit	8,431,186,606	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit	8,431,186,606	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	8,431,186,606	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	8,431,186,606	
I.III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	5 Unit	161,414,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	5 Unit	161,414,200	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	93 Pasang	83,700,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	93 Pasang	83,700,000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Nunukan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	20 Orang	48,658,200	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Nunukan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	20 Orang	48,658,200	
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	5 Perda	29,056,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	5 Perda	29,056,000	
I.IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit	243,888,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit	243,888,100	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bogor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	12 Bulan	2,052,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bogor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	12 Bulan	2,052,800	



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2022

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 2 Dari 4

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Unit	42,800,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Unit	42,800,000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	50 Jenis	41,291,950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	50 Jenis	41,291,950	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	6,875,550	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	6,875,550	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	22 Kali	150,867,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	22 Kali	150,867,800	
I.V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,043,724,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,043,724,000	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	90,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	90,000,000	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	2,953,724,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	2,953,724,000	
I.VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	175,088,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	175,088,000	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Nunukan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 Unit	162,488,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Nunukan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 Unit	162,488,000	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit	4,750,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit	4,750,000	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	10 Unit	7,850,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	10 Unit	7,850,000	
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100%	3,070,334,400	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100%	3,070,334,400	Program Indikator Kinerja Utama (IKU)
II.J	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	500 Kegiatan Operasi	1,640,913,400	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	500 Kegiatan Operasi	1,640,913,400	



**Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2022**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 3 Dari 4

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Nunukan	Jumlah operasi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang dilaksanakan	500 Kegiatan Operasi	1,208,187,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Nunukan	Jumlah operasi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang dilaksanakan	500 Kegiatan Operasi	1,208,187,000	
18	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kabupaten Nunukan	Jumlah operasi Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilaksanakan	3 Kegiatan	28,000,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kabupaten Nunukan	Jumlah operasi Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilaksanakan	3 Kegiatan	28,000,000	
19	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	119,735,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	119,735,000	
20	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Kabupaten Nunukan	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan dikukuhkan	250 Orang	52,648,500	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Kabupaten Nunukan	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan dikukuhkan	250 Orang	52,648,500	
21	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kabupaten Nunukan	Jumlah Satlinmas yang dilakukan pembekalan dan peningkatan kapasitas	100 Orang	132,342,900	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kabupaten Nunukan	Jumlah Satlinmas yang dilakukan pembekalan dan peningkatan kapasitas	100 Orang	132,342,900	
22	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Kabupaten Nunukan	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang dilaksanakan	10 Kegiatan	60,000,000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Kabupaten Nunukan	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang dilaksanakan	10 Kegiatan	60,000,000	



**Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2022**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 4 Dari 4

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kabupaten Nunukan	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	2 Orang	40,000,000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kabupaten Nunukan	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	2 Orang	40,000,000	
II.II	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	7 Perda	169,449,600	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	7 Perda	169,449,600	
24	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dilaksanakan	2 Kecamatan	54,792,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dilaksanakan	2 Kecamatan	54,792,000	
25	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Operasi Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dilaksanakan	30 Operasi	74,657,600	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Operasi Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dilaksanakan	30 Operasi	74,657,600	
26	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani	50 Pelanggar	40,000,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani	50 Pelanggar	40,000,000	
II.III	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Orang	75,086,400	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Orang	75,086,400	
27	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah PNS Satpol PP yang telah mengikuti pengembangan kapasitas dan karier PPNS	2 Orang	75,086,400	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah PNS Satpol PP yang telah mengikuti pengembangan kapasitas dan karier PPNS	2 Orang	75,086,400	



1.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Pada pelaksanaan forum Musrenbang tingkat kecamatan se Kabupaten Nunukan, tidak terdapat usulan/masukkan maupun rekomendasi untuk menjadi Program/Kegiatan Satuan polisi Pamong Praja.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kabupaten Nunukan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/Volume	Catatan
	NIHIL				



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.* Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
“Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sasaran Program Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi



Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan indikator kegiatan Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Nunukan hanya saja masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan berbagai kendala yang dihadapi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran atau implementasi dari RPJMD Kabupaten Nunukan dan pernyataan visi dan misi Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah "Mewujudkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda/Perkada".

Sedangkan Sasaran dari Renacan Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan secara proporsional melalui program kegiatan yang bersifat spesifik, terinci serta dapat diukur serta dicapai. Berdasarkan maksud penetapan sasaran dalam kurun waktu satu tahun yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda/Perkada, dan
2. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3).



Tabel III. 1

TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN SATPOL PP TAHUN 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TAHUN 2022
1	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda/Perkada	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda/Perkada	Presentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda/Jumlah Pelanggaran Perda X 100%	90
		Meningkatkannya Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Jumlah Operasi yang selesai/Target Operasi X 100%	100



3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan implementasi tugas yang dilaksanakan secara nyata dan terpadu yang merupakan Kebijakan sebagai arah dan juga dijadikan sebagai Pedoman, pegangan, petunjuk aparatur Pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan tugas dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian **Visi dan Misi** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satpol PP dalam Renja 2020 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan 2016-2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan sesuai dengan Misi 4 Bupati Nunukan yaitu Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum. Adapun untuk mendukung misi bupati tersebut diatas berikut kami sampaikan bahan pertimbangan rumusan Program dan Kegiatan seperti dibawah ini :

I. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2022 :

- Jumlah Program : 2
- Jumlah Kegiatan : 9
- Jumlah Sub Kegiatan : 27
- Pagu Indikatif APBD : Rp 13.998.900.306,-

II. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan di Tahun 2022 adalah :

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,



- Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota



c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

III. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi Pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan di Tahun 2022 adalah :

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA;

d. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

g. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2022 berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada Tabel IV.I seperti dibawah ini :



TABEL IV. 1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

Lembar 1 Dari 4

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			12,113,450,906				12,410,510,364
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas		10 Dokumen	58,150,000	APBD II		10 Dokumen	59,022,250
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	15,500,000	APBD II		2 Dokumen	15,732,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kabupaten Nunukan	8 Dokumen	42,650,000	APBD II		8 Dokumen	43,289,750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan		14 Bulan	8,431,186,606	APBD II		14 Bulan	8,557,654,406
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	14 Bulan	8,431,186,606	APBD II		14 Bulan	8,557,654,406
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian		5 Unit	161,414,200	APBD II		5 Unit	456,907,427
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Kabupaten Nunukan	93 Pasang	83,700,000	APBD II		93 Pasang	84,955,500
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Kabupaten Nunukan	20 Orang	48,658,200	APBD II		20 Orang	49,388,073
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	Kabupaten Nunukan	5 Perda	29,056,000	APBD II		5 Perda	29,491,840
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum		5 Unit	243,888,100	APBD II		5 Unit	247,546,422



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2022

Lembar 2 Dari 4

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum		5 Unit	243,888,100	APBD II		5 Unit	247,546,422
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	2,052,800	APBD II		12 Bulan	2,083,592
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Nunukan	6 Unit	42,800,000	APBD II		6 Unit	43,442,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Nunukan	50 Jenis	41,291,950	APBD II		50 Jenis	41,911,329
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	6,875,550	APBD II		12 Bulan	6,978,683
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Kabupaten Nunukan	22 Kali	150,867,800	APBD II		22 Kali	153,130,817
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Nunukan	100%	Rp 3,043,724,000	APBD II		100%	Rp 3,089,379,860
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Bulan	90,000,000	APBD II		12 Bulan	91,350,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Bulan	2,953,724,000	APBD II		12 Bulan	2,998,029,860
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	175,088,000	APBD II		12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kabupaten Nunukan	9 Unit	162,488,000	APBD II		9 Unit	164,925,320
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Nunukan	8 Unit	4,750,000	APBD II		8 Unit	4,821,250
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kabupaten Nunukan	10 Unit	7,850,000	APBD II		10 Unit	7,967,750



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2022

Lembar 3 Dari 4

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan		100%	1,885,449,400	APBD II		100%	1,913,731,141
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani		150	1,640,913,400	APBD II		150	1,665,527,101
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah operasi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang dilaksanakan	Kabupaten Nunukan	500 Kegiatan Operasi	1,208,187,000	APBD II		500 Kegiatan Operasi	1,226,309,805
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah operasi Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilaksanakan	Kabupaten Nunukan	3 Kegiatan	28,000,000	APBD II		3 Kegiatan	28,420,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Utara, Jakarta	2 Kegiatan	119,735,000	APBD II		2 Kegiatan	121,531,025
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinas yang Terlatih dan dikukuhkan	Kab. Nunukan, Prov. Kaltara	250 Orang	52,648,500	APBD II		250 Orang	53,438,228
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Satlinas yang dilakukan pembekalan dan peningkatan kapasitas	Kab. Nunukan, Prov. Kaltara	100 Orang	132,342,900	APBD II		100 Orang	134,328,044

Lembar 4 Dari 4



**Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2022**

	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kab. Nunukan, Prov. Kaltara	10 Kegiatan	60,000,000	APBD II		10 Kegiatan	60,900,000
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Nunukan	2 Orang	40,000,000	APBD II		2 Orang	40,600,000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan		7 Perda	169,449,600	APBD II		7 Perda	171,991,344
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dilaksanakan	Kabupaten Nunukan	2 Kecamatan	54,792,000	APBD II		2 Kecamatan	55,613,880
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dilaksanakan	Kabupaten Nunukan	30 Operasi	74,657,600	APBD II		30 Operasi	75,777,464
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani	Kabupaten Nunukan	50 Pelanggar	40,000,000	APBD II		50 Pelanggar	40,600,000
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		2 Orang	75,086,400	APBD II		2 Orang	76,212,696
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PNS Satpol PP yang telah mengikuti pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Bogor	2 Orang	75,086,400	APBD II		2 Orang	76,212,696



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2022 sebagai suatu penjabaran dari Perubahan RENSTRA Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan yang disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi serta kewenangan Satpol PP Kabupaten Nunukan.

Rencana Kerja Tahun 2022 disusun sebagai dasar pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dalam penegakan Perda dan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Dengan adanya Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Nunukan dapat lebih terarah, terintegrasi dan terkoordinasi serta sinergitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2022

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Kontribusi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Nunukan, 20 Juli 2021

KEPALA SATUAN,



Drs. ABDUL KADIR
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19621231 198512 1 028